

Abstrak

Penelitian ini mengambil tema tentang konflik pasca otonomi. Diawali dengan perdebatan tentang otonomi sebagai solusi konflik atau justru sebagai sumber konflik. Otonomi menjadi alternatif cara untuk menyelesaikan konflik separatis. Pada kenyataannya, meskipun perjanjian damai telah berhasil ditandatangani dan otonomi telah diberikan, namun konflik masih terjadi di wilayah yang telah diberikan otonomi. Contoh kasus yang terjadi di Aceh dan Mindanao. Kedua wilayah ini sebelumnya menghadapi konflik separatis dan berakhir damai dengan penandatanganan MoU Helsinki untuk Aceh dan *Comprehensive Agreement on Bangsamoro* untuk Mindanao. Di kedua wilayah yang telah diberikan status otonomi oleh pemerintah pusatnya ini masih muncul konflik dan sulit untuk mewujudkan rasa aman dan damai. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini dan terjadi di kedua wilayah didasari oleh masalah tanah dan sumber daya alam. Sebagaimana diketahui, bahwa tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam menjadikan manusia dapat memenuhi kebutuhannya sehingga kelangsungan hidupnya dapat terjamin. Konflik yang terjadi di kedua wilayah ini disebabkan adanya tiga alasan. Pertama, adanya hal-hal yang masih belum dipenuhi pemerintah dari tuntutan kelompok separatis. Kedua, adanya persaingan antar kelompok terkait perebutan tanah dan sumber daya alam. Ketiga, perebutan kekuasaan dalam pemilu. Karena kedua kasus ini berusaha menganalisa konflik pasca otonomi, maka penelitian dilakukan dalam kurun waktu pasca perundingan damai antara pemerintah dengan kelompok separatis.

Keywords: otonomi, kelompok bersenjata, pemilu